

---

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
BOGOR DAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2024-2029**

**Heirunissa<sup>1</sup>, Herman Susilo<sup>2</sup>, Nuryani Susana<sup>3</sup>**

STIE Gici Business School

[nissataslim.01@gmail.com](mailto:nissataslim.01@gmail.com)<sup>1</sup>, [hersusilo72@gmail.com](mailto:hersusilo72@gmail.com)<sup>2</sup>, [nuryanisusan@gmail.com](mailto:nuryanisusan@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Evaluasi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat perlu menyertakan perihal faktor-faktor yang berpengaruh, yaitu : Pertama, pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara serentak sehingga sosialisasi dilakukan bersama. Kedua, partisipasi pemerintah dalam mensosialisasikan Pilwalkot dan Pemilihan Gubernur (Pilgub). Ketiga, calon melakukan kampanye yang kreatif dan menarik. Keempat, bentuk dan cara sosialisasi Pilwalkot dan Gubernur yang menggembarakan. Kelima, masyarakat semakin cerdas dan melek demokrasi. Tingkat partisipasi pemilih tergolong cukup tinggi dan memenuhi target yang ditetapkan KPU yaitu mencapai 61.31 persen menandakan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Model partisipasi masyarakat melalui pengawasan yang melibatkan penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile dan platform online untuk melaporkan pelanggaran, memantau proses Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat, dan mendokumentasikan data secara real-time. Dalam pelaksanaan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat 2024 terjadi kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemungutan suara.

**Kata Kunci : Pilkada, Pilgub, Demokrasi, Partisipasi Politik**

**PENDAHULUAN**

Pemilihan merupakan cara persuasif untuk memengaruhi orang dengan cara yang tidak memaksa, seperti melalui retorika, hubungan publik, komunikasi massa, dan lobi. Meskipun agitasi dan propaganda dilarang di negara demokrasi, para kandidat dan komunikator politik sering menggunakan metode ini selama periode kampanye (Arifin, 2006). Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Kemampuan rakyat untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi (Nugroho, 2012).

Partisipasi politik masyarakat, meskipun sekadar dalam bentuk penyaluran hak pilih dalam pemilihan umum, mempunyai peran penting dalam kehidupan politik negara. Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara (Sahid, 2015). Masalah partisipasi politik bukan hanya menyangkut

watak atau sifat dari pemerintahan negara, melainkan lebih berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat suatu negara dan pengaruh yang ditimbulkannya. Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilihan Kepala Daerah Kota Bogor dan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat serentak kembali digelar pada tanggal 27 November 2024. Pilkada Kota Bogor saat ini diikuti oleh lima pasangan calon (Paslon), yang resmi mendaftar ke KPU diantaranya, yaitu :

1. Pasangan pertama dengan nomor urut 1 yakni, Sendi Fardiansyah, S.ST., M.M. dan Melli Darsa, S.H, L.L.M yang diusung Partai Golkar, Partai Nasdem dan PSI.
2. Pasangan kedua dengan nomor urut 2 yakni, Dr.H. Atang Trisnanto, S.Hut.,M.Si dan Anninda Allivia, yang diusung PKS dan Partai Ummat.
3. Pasangan ketiga dengan nomor urut 3 yakni Drs. Dedie Rachim, M.A dan Jenal Mutaqin yang diusung PAN, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Gelora.
4. Pasangan keempat dengan nomor urut 4 yakni, Rena Da Frina, S.P.,M.M dan Achmad Teddy Risandi, yang diusung PDIP dan Partai Hanura.
5. Pasangan kelima dengan nomor urut 5 yakni Dr. dr. Raendi Rayendra, SpKK.,M.Kes dan Eka Maulana, diusung PKB, PPP, PBB, Partai Buruh, Partai Garuda dan PKN.

KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengundian dan penetapan nomor urut untuk calon Gubernur Provinsi Jawa Barat, dimana ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasangan pertama dengan nomor urut 1 yakni yakni Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwi Natarina yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Pasangan kedua dengan nomor urut 2 yakni yakni Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDI-P).
3. Pasangan ketiga dengan nomor urut 3 yakni yakni Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie yang diusung oleh PKS, PPP, dan Partai NasDem.
4. Pasangan keempat dengan nomor urut 4 yakni yakni Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan yang diusung oleh gabungan parpol yang terdiri dari Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, PAN, Partai Buruh, PBB, Gelora, dan Perindo.

Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat ini dilakukan secara terbuka, publik, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dimana pengawasan diperlukan agar asas tersebut tercapai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga tetap yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat. Untuk menjamin Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat yang demokratis, masyarakat harus berpartisipasi, artinya pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu secara keseluruhan. Kepercayaan publik, legitimasi, tanggung jawab, dan kualitas layanan publik serta tingkat pencegahan pembangkangan publik sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat (Winanda *et al.* 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, telah dicatat bahwa masyarakat masih kurang terlibat dalam pengawasan pemilihan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya pemahaman tentang fungsi masyarakat dalam pengawasan pemilihan Pilkada Kota

Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam menjamin pemilihan yang adil dan bebas dari manipulasi.

Untuk mengatasi masalah ini, pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memasyarakatkan kepedulian dan memastikan partisipasi aktif Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat serentak 2024 ini sangat penting. Ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam menjamin proses demokrasi yang adil dan transparan. Dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, stakeholder masyarakat, dan lembaga pemerintah terkait, diharapkan suatu model yang berkelanjutan akan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga integritas proses Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat bersamaan, yang akan menghasilkan legitimasi yang kuat untuk pemerintahan yang terpilih dan dasar demokrasi Indonesia diperkuat.

### **Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Sebagai wujud realisasi bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) kegiatan yang bertemakan "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Wali Kota Bogor dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2029" ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting untuk memantau Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat serentak 2024 yang mencakup pemahaman mendalam tentang pentingnya integritas sistem politik dan dampak dari partisipasi aktif dalam proses demokrasi.
2. Memberikan masyarakat pengetahuan dan keterampilan praktis tentang metode pengawasan Pemilu yang efektif. Ketua dan anggota KPPS melakukan mekanisme pengawasan yang tepat, serta pengumpulan dan analisis data terkait Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat.
3. Membangun jaringan dan kolaborasi antara berbagai kelompok masyarakat, LSM, dan pihak terkait lainnya yang peduli dengan pengawasan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat, sehingga proses transparansi dan kejujuran dapat terlihat serta melaporkan potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi selama Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat.
4. Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kejujuran proses Pemilu melalui peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat, dengan partisipasi yang tinggi diharapkan dapat menciptakan legitimasi yang kuat bagi hasil Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat dan meningkatkan kepercayaan publik.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di TPS 10 tepatnya di Jl. Aria Surialaga No. 5F, RT. 01/RW.06, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sebagai mitra PKM yaitu pengurus RT 01, RT 02, dan RT 04 dengan RW 06 dan RW 012, Pelaksana Pemungutan Suara (PPS), dan Saksi dari pihak KPPS Pemilu, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Wali Kota Bogor dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2029 dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 27 November 2024

Pukul : 07.00 – 13.00 WIB

Tempat : Jalan Aria Surialaga No. 5F, RT. 01/RW.06, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Penulis saat ini ikut serta dalam Pengawas TPS 10 Kelurahan Pasir Jaya. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas pengawas TPS adalah sebagai berikut :

- Persiapan Pemungutan Suara
- Pelaksanaan Pemungutan Suara
- Persiapan Penghitungan Suara
- Pelaksanaan Penghitungan Suara
- Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS

Setelah mengetahui Tugas PTPS, penting untuk mengetahui kewenangan dari Pengawas TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berikut adalah wewenang dari Pengawas TPS:

- Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
- Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pengawas TPS berkewajiban untuk:

- Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Pengawas TPS tidak hanya bekerja pada hari pemungutan suara tetapi bekerja sejak tahapan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan, serta pelaksanaan pemungutan suara. Setelah dilantik, PTPS siap menjadi ujung tombak dan garda terdepan pengawasan pesta demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan Pilkada di TPS 10 dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 592 dan surat suara yang digunakan pemilih sebanyak 363. Tingkat partisipasi pemilih tergolong cukup tinggi dan memenuhi target yang ditetapkan KPU yaitu mencapai 61.31 persen menandakan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

### **Analisis Manfaat Pelaksanaan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat**

a. Pemahaman masyarakat Kota Bogor, terutama yang mempunyai hak pilih, terhadap penyelenggaraan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik. Hal ini tidak lepas dari proses sosialisasi yang dilaksanakan

oleh KPU. Akurasi data kependudukan yang menjadikan DPT tersusun dengan baik juga menjadikan tidak munculnya permasalahan atau konflik selama penyelenggaraan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat.

- b. Kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak pilih secara benar cukup tinggi. Hal ini jelas terbukti dari angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat.
- c. Ketersediaan data pemilih  
Guna penyelenggaraan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bogor telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan kebutuhan penyusunan DPT. Sesuai dengan data kependudukan yang ada, KPU melakukan pemilihan dan pemilahan data untuk menentukan penduduk mana yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu penduduk yang telah berusia 17 tahun atau lebih.

### **Analisis Akibat Pelaksanaan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat**

1. Tingginya partisipasi masyarakat  
KPU Kota Bogor dapat dikatakan telah sukses menyelenggarakan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat tahun 2024 jika dilihat dari angka partisipasi masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dari Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yaitu mencapai 61,31 persen dari DPT.
2. Situasi Kota Bogor sebelum dan setelah Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat tetap kondusif, yang menunjukkan keberhasilan KPU dalam berkoordinasi dengan jajaran penegak hukum serta kerjasama semua elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan.
3. Kesadaran masyarakat Kota Bogor untuk menjaga dan mematuhi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat, menerima hasil, serta menjaga agar situasi daerah tetap kondusif.

Evaluasi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat juga perlu menyertakan perihal faktor-faktor yang berpengaruh, yaitu : *Pertama*, pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara serentak sehingga sosialisasi dilakukan bersama. *Kedua*, partisipasi pemerintah dalam mensosialisasikan Pilwalkot dan Pemilihan Gubernur (Pilgub). *Ketiga*, calon melakukan kampanye yang kreatif menarik. *Keempat*, bentuk dan cara sosialisasi Pilwalkot dan Gubernur yang menggembarakan. *Kelima*, masyarakat semakin cerdas dan melek demokrasi.

Berdasarkan informasi di atas serta didukung informasi lain yang penulis peroleh, dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat guna menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, antara lain Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Dua putusan MK Nomor 60 dan 70 tahun 2024 sepenuhnya telah diakomodasi di Pasal 11 dan 15 PKPU. Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan untuk mewujudkan dan menegakkan demokrasi di daerah.

- b. Perilaku politik pasangan calon peserta dimana seluruh Paslon beserta pendukungnya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyalahi aturan serta mengganggu situasi dan kondisi yang sudah kondusif.
- c. Dukungan Pemerintah Kota Bogor dalam mendukung proses sosialisasi serta pemutakhiran data kependudukan guna penyusunan DPT.
- d. Tingginya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap arti penting demokrasi di daerah yang terwujud salah satunya melalui pemilihan kepala daerah.

Pengawasan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat merupakan elemen penting dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, peneliti menguraikan konsep pengawasan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat yang meliputi serangkaian strategi dan mekanisme yang dirancang untuk memantau dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan, termasuk proses pendaftaran pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Konsep ini juga mencakup upaya dalam menangani pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi selama proses Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat. Menurut Hadar (2018) menyatakan bahwa pengawasan pemilihan suara menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan, di mana masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai pengawas independen yang dapat melaporkan potensi pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat meliputi peran masyarakat dalam memantau proses, mendeteksi kecurangan, melaporkan pelanggaran, serta memastikan integritas dan transparansi pelaksanaan. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap hasil Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat, tetapi juga mendorong terciptanya sistem politik yang lebih akuntabel (Fox, 2015). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat merupakan pilar utama dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen yang dapat memantau, mendokumentasikan, dan melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.

Model partisipasi masyarakat melalui pengawasan yang melibatkan penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile dan platform online untuk melaporkan pelanggaran, memantau proses Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat, dan mendokumentasikan data secara real-time. Dalam pelaksanaan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat 2024 terjadi kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemungutan suara. Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat terkait hak-hak pemilih, prosedur, dan keterampilan pengawasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang mencakup strategi partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi, kerja sama antar-lembaga, dan program pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat.

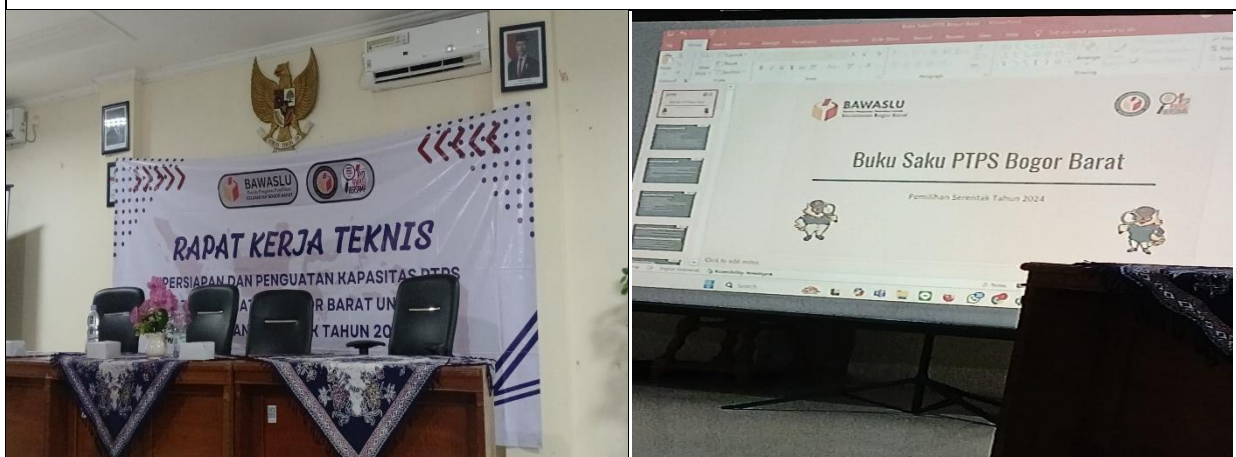
Lebih jauh, adanya partisipasi masyarakat dapat mengurangi potensi terjadinya manipulasi hasil pemungutan suara serta memperkuat legitimasi institusi demokratis. Di samping itu, melalui partisipasi dalam pengawasan Pilkada Kota Bogor dan Pilgub

Provinsi Jawa Barat, masyarakat dapat merasakan bahwa hak suara mereka dihormati dan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama, sehingga tercipta kepercayaan yang lebih tinggi terhadap proses demokrasi secara keseluruhan (Norris, 2019).

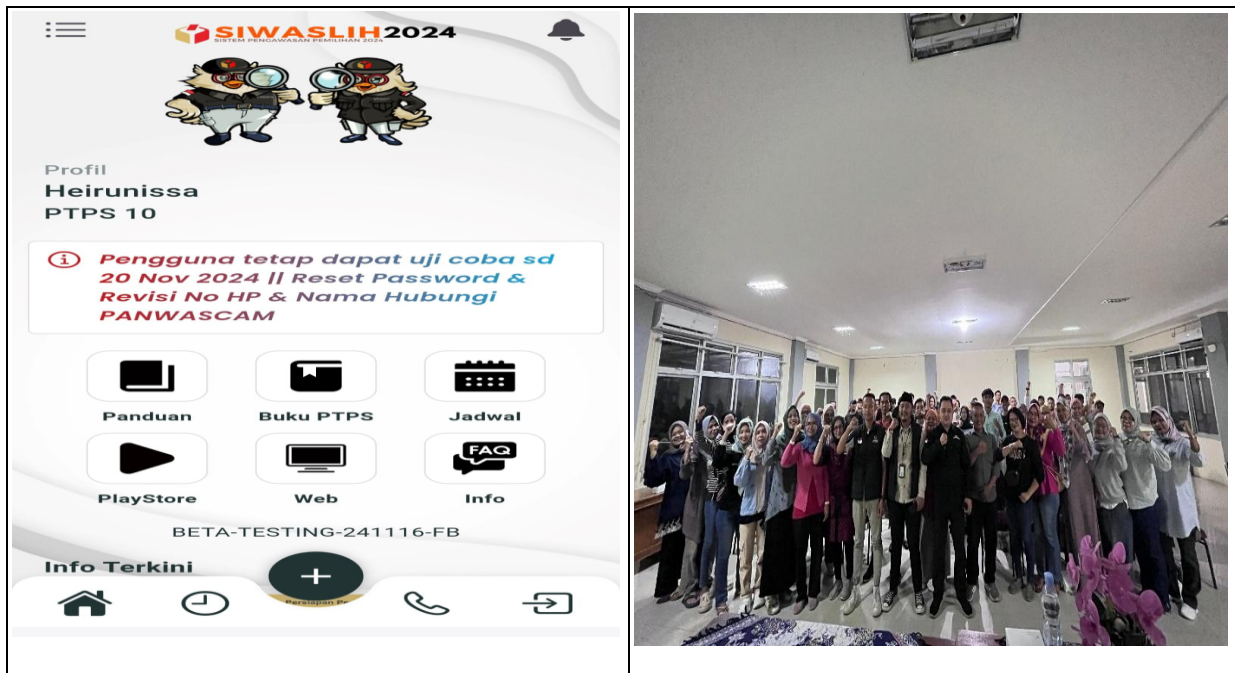
### Dokumentasi Kegiatan PKM



**Gambar 1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji PTPS**



**Gambar 2. Rekernis I Simulasi Aplikasi SIWASLIH 2024**



**Gambar 3. Rakernis II PTPS di Kantor Kecamatan**



**Gambar 4. Pembagian surat undangan ke warga pemilih dan penyerahan logistik PILKADA 2024 kepada Ketua KPPS TPS 10**





**Gambar 5. Sumpah dan Janji Ketua dan Anggota KPPS TPS 10**



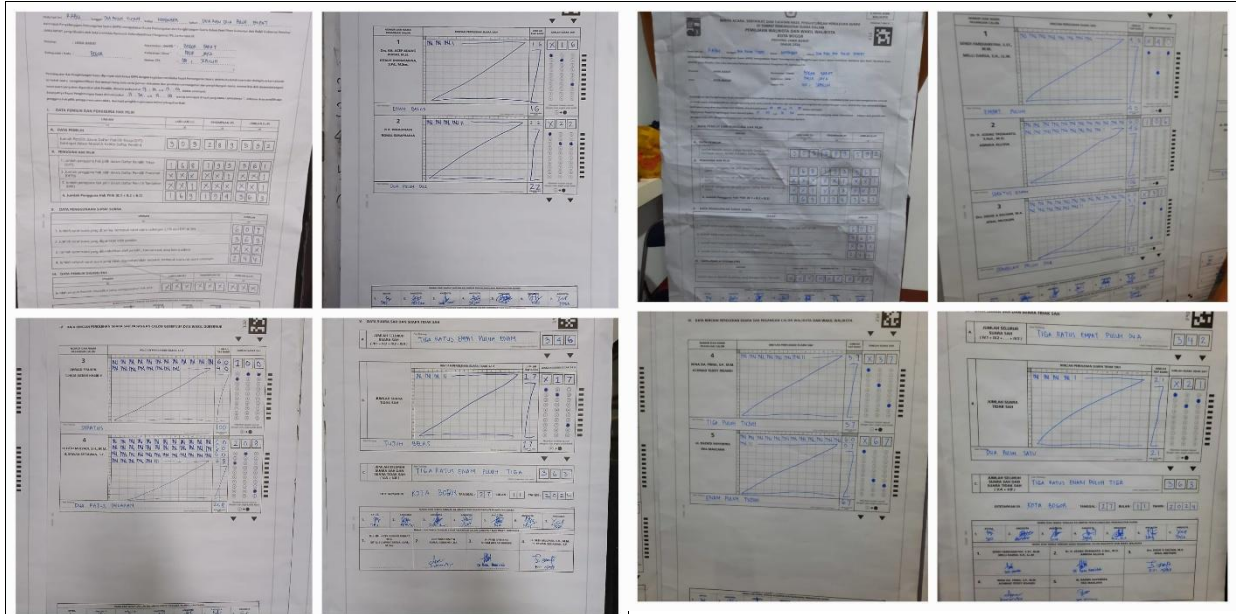
**Gambar 6. Pelaksanaan PILKADA 2024**



**Gambar 7. Pelaksanaan PILKADA 2024 dihadiri Lurah Pasir Jaya dan tim nya**



**Gambar 8. Penghitungan suara disaksikan Panwas dan Saksi**



**Gambar 9. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat 2024**

**Gambar 10. Hasil Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor 2024**

## KESIMPULAN

Partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam kemauan memberikan suara, termasuk dalam Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Dalam skala lebih luas, partisipasi masyarakat akan menentukan legitimasi kepala daerah yang terpilih, keberlangsungan demokrasi, serta pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, KPU Daerah mengemban tuntutan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya selalu tinggi.

Berdasarkan pengalaman Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat 2024, diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih tergolong cukup tinggi dan memenuhi target yang ditetapkan KPU. Angka partisipasi yang mencapai 61,31 persen menandakan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam rangka memilih pasangan Kepala Daerah Kota Bogor dan Gubernur Provinsi Jawa Barat periode kepemimpinan 2019-2024 tersebut.

Meskipun angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Provinsi Jawa Barat terhitung cukup tinggi dan jumlah surat suara tidak sah cukup rendah, namun patut diwaspadai kemungkinan munculnya faktor-faktor yang dapat mengakibatkan tingkat partisipasi tersebut menurun pada gelaran pemilihan kepala daerah mendatang. Faktor tersebut seperti perilaku politik uang yang justru dapat menimbulkan rasa ragu atau bahkan antipati terhadap berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang bersih dan jujur.

## SARAN

Kegiatan sejenis ini bersifat berkelanjutan di pemerintahan Indonesia per lima tahunan sekali untuk Pemilihan Kepala Daerah bagi kegiatan pengabdian selanjutnya agar dapat membantu terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah secara damai, jujur dan sebagai sarana integrasi bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin A. 2006. *Pencitraan dalam politik*. Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Fox, J. 2015. Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?. *World Development* 72. 346-361.
- Hadar, L. 2018. The Role of Election Oversight in Strengthening Democratic Institutions. *Journal of Comparative Politics* 28.2: 45-62.
- Norris, P. 2019. Strengthening Democracy: The Role of Civil Society in Electoral Oversight. *Journal of Democracy* 25.3. 78-92
- Nugroho, H. 2012. Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.1 No.1.
- Sahid, K. 2015. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Winanda K, Permatasari, B., & Suntara, R. A. 2022. Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 2(2), 93-104.  
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/15256>
- <https://news.detik.com/pilkada/d-7515703/5-pasangan-resmi-daftar-ke-kpu-untuk-pilkada-kota-bogor-2024>
- <https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7554762/sah-ini-nomor-urut-empat-pasangan-calon-pilgub-jabar-2024>.